

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 188.45/687/ KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/689/KEP/35.07.013/2017
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN
AKHIR RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

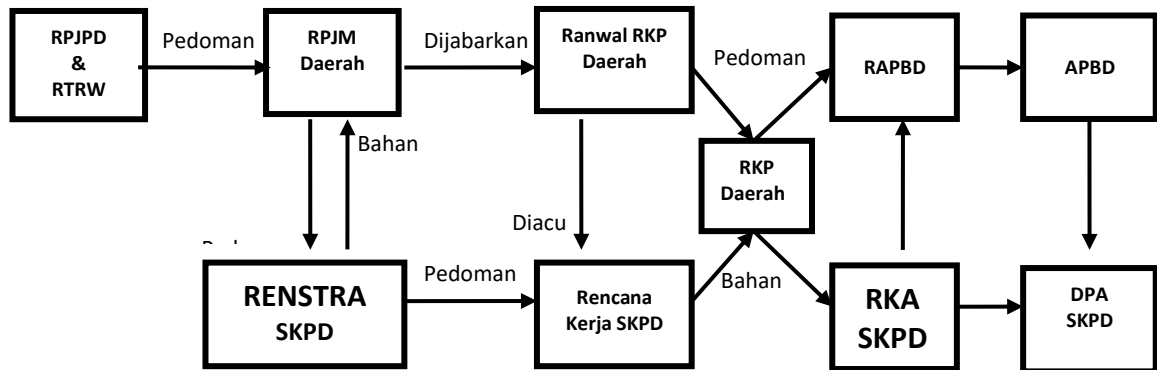
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang merupakan gabungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang dan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2018 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja mulai dilakukan setelah diterbitkannya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Malang Nomor: 050/6447/35.07.202/2018 tanggal 3 Oktober 2018, Hal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan setelah Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/689/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MALANG

Bab IV PENUTUP.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2018

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.5.087.358.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.985.610.800,00 atau sebesar 98%.

Pada Tahun 2018, ditargetkan sebesar Rp. 4.420.456.000,00 sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.353.341.000,00 atau sebesar 30,62%.

Berdasarkan target yang ditetapkan tahun 2018, capaian kinerja program dan kegiatan diperkirakan mencapai 100%, pencapaian realisasi anggaran tahun 2018, diperkirakan mencapai 100%.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program adalah :

a. Faktor pendorong :

- Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini dapat dilihat dari Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 yang menyatakan melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM Desa, dan pengembangan produk unggulan desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya baik di tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, memberikan payung hukum untuk melaksanakan dan mengoptimalkan pembangunan di tingkat desa.
- Peraturan Bupati Malang tentang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memberikan payung hukum bagi dinas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;

- Adanya program-program dari Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang menawarkan kerjasama untuk saling sinergis dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.
- Adanya budaya gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

b. Faktor penghambat

- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintahan;
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
- Masih belum optimalnya penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang sehingga perlu sinergitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- Luas wilayah Kabupaten Malang dan kondisi geografis wilayah yang banyak di daerah pegunungan, memerlukan waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pencapaian Target Rencana Strategis Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 dan tahun 2018 sampai dengan triwulan II, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG PERIODE PELAKSANAAN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
					22.776.635.275,00		3.709.065.000,00		4.420.456.000,00		1.353.341.000,00		30,62		5.062.406.000,00		22,23	
1	2.207.21.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.324.027.875,00	100%	837.269.000,00	100%	1.323.499.000,00	50%	530.998.050,00	50,00	40,12	50%	1.368.267.050,00	50,00	21,64	
	2.207.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2400 buah	61.721.000,00	2200 buah	10.000.000,00	2250 buah	12.000.000,00	1486 buah	6.000.000,00	66,04	50,00	1486 buah	16.000.000,00	61,92	25,92	-
	2.207.21.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	2.617.032.000,00	363 ob	353.610.000,00	363 ob	546.741.000,00	189 ob	260.004.000,00	52,07	47,56	189 ob	613.614.000,00	52,07	23,45	-
	2.207.21.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	9701 jenis	304.473.500,00	1931 jenis	45.866.500,00	1935 jenis	60.000.000,00	1183 jenis	30.996.000,00	61,14	51,66	3114 jenis	76.862.500,00	32,10	25,24	-
	2.207.21.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 jenis	103.939.000,00	32680 jenis	17.100.000,00	1525 jenis	20.148.000,00	790 jenis	9.673.000,00	51,80	48,01	790 jenis	26.773.000,00	2,41	25,76	
	2.207.21.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 jenis	13.383.375,00	40 jenis	2.427.500,00	45 jenis	2.540.000,00	21 jenis	975.000,00	46,67	38,39	21 jenis	3.402.500,00	35,00	25,42	-
	2.207.21.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	28.944.000,00	1584 jenis	5.400.000,00	1584 jenis	5.400.000,00	600 jenis	2.250.000,00	37,88	41,67	600 jenis	7.650.000,00	37,88	26,43	
	2.207.21.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13500 hok	947.040.000,00	12084 hok	132.765.000,00	14940 hok	199.275.000,00	3917 hok	53.462.500,00	26,22	26,83	3917 hok	186.227.500,00	29,01	19,66	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.207.21.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	165 hok	1.160.650.000,00	148 hok	112.575.000,00	423 hok	253.075.000,00	126 hok	76.847.550,00	29,79	30,37	126 hok	189.422.550,00	76,36	16,32	
	2.207.21.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	575 hok	1.086.845.000,00	418 hok	157.525.000,00	565 hok	224.320.000,00	264 hok	90.790.000,00	46,73	40,47	264 hok	248.315.000,00	45,91	22,85	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												50,00	40,12			50,00	21,64	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												46,48	41,66			41,41	23,45	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
2	2.207.21.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.655.764.650,00	100%	102.581.000,00	100%	576.134.000,00	50%	22.563.200,00	50,00	3,92	50%	125.144.200,00	50,00	7,56	
	2.207.21.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	8 unit	1.038.126.000,00	0 unit	0,00	4 unit	452.696.000,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	
	2.207.21.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	18 jenis	292.519.650,00	14 jenis	42.753.000,00	15 jenis	61.894.000,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	0 jenis	42.753.000,00	0,00	14,62	-
	2.207.21.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	19 unit	217.941.000,00	15 unit	38.328.000,00	16 unit	42.480.000,00	11 unit	16.305.700,00	68,75	38,38	11 unit	54.633.700,00	57,89	25,07	
	2.207.21.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	107.178.000,00	30 jenis	21.500.000,00	25 jenis	19.064.000,00	11 jenis	6.257.500,00	44,00	32,82	11 jenis	27.757.500,00	36,67	25,90	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												50,00	3,92			50,00	7,56	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												28,19	17,80			23,64	16,40	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
3	2.207.21.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	114.000.000,00	100%	0,00	100%	52.947.000,00	100%	52.947.000,00	100,00	100,00	100%	52.947.000,00	100,00	46,44	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	2.207.21.03.0 1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	114.000.000,00	0 Stel	0,00	54 Stel	52.947.000,00	54 Stel	52.947.000,00	100,00	100,00	54 Stel	52.947.000,00	101,89	46,44	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	100,00			100,00	46,44	
Predikat Kinerja Program												ST	ST			ST	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00			101,89	46,44	
Predikat Kinerja Kegiatan												ST	ST			ST	SR	
4	2.207.21.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	13.275.000,00	100%	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100,00	100,00	100%	5.000.000,00	100,00	37,66	
	2.207.21.04.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	13.275.000,00	25 orang	2.500.000,00	25 orang	2.500.000,00	25 orang	2.500.000,00	100,00	100,00	25 orang	5.000.000,00	100,00	37,66	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	100,00			100,00	37,66	
Predikat Kinerja Program												ST	ST			ST	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00			100,00	37,66	
Predikat Kinerja Kegiatan												ST	ST			ST	SR	
5	2.207.21.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	599.077.250,00	100%	114.057.000,00	100%	118.405.500,00	60%	41.933.750,00	60,00	35,42	60%	155.990.750,00	60,00	26,04	
	2.207.21.05.0 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	535.349.750,00	9 Buku	100.815.000,00	14 Buku	106.679.000,00	10 Buku	41.933.750,00	71,43	39,31	10 Buku	142.748.750,00	83,33	26,66	-
	2.207.21.05.0 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	25.203.000,00	1 buku	5.927.000,00	1 buku	4.485.000,00	0 buku	0,00	0,00	0,00	0 buku	5.927.000,00	0,00	23,52	
	2.207.21.05.0 3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	38.524.500,00	1 buku	7.315.000,00	1 buku	7.241.500,00	0 buku	0,00	0,00	0,00	0 buku	7.315.000,00	0,00	18,99	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												60,00	35,42			60,00	26,04	
Predikat Kinerja Program												R	SR			R	SR	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
									Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		23,81	13,10			27,78	23,06		
									Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR		
6	2.207.21.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	2.796.252.500,00	33,33%	440.000.000,00	50%	566.252.500,00	25%	178.822.500,00	50,00	31,58	25%	618.822.500,00	25,00	22,13	
	2.207.21.06.01	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	130 desa	900.000.000,00	26 desa	170.000.000,00	26 desa	175.000.000,00	20 desa	115.775.000,00	76,92	66,16	46 desa	285.775.000,00	35,38	31,75	-
	2.207.21.06.02	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	15 Kec.	825.587.500,00	33 Kec.	70.000.000,00	33 Kec.	180.587.500,00	18 Kec.	22.042.000,00	54,55	12,21	18 Kec.	92.042.000,00	120,00	11,15	
	2.207.21.06.03	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	1.070.665.000,00	33 Kec.	200.000.000,00	33 Kec.	210.665.000,00	33 Kec.	41.005.500,00	100,00	19,46	33 Kec.	241.005.500,00	100,00	22,51	Realisasi anggaran pada Triwulan I digunakan untuk monitoring laporan swadaya masyarakat.
									Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		50,00	31,58			25,00	22,13		
									Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR		
									Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		77,16	32,61			85,13	21,80		
									Predikat Kinerja Kegiatan		T	SR			T	SR		
7	2.207.21.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	100%	2.661.459.000,00	20%	634.928.000,00	36%	572.304.000,00	20%	165.050.000,00	55,56	28,84	20%	799.978.000,00	20,00	30,06	
	2.207.21.07.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	18 desa	1.206.825.000,00	10 desa	344.800.000,00	12 desa	200.000.000,00	6 desa	54.454.000,00	50,00	27,23	6 desa	399.254.000,00	33,33	33,08	-
	2.207.21.07.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	16 desa	532.000.000,00	0 desa	0,00	6 desa	127.000.000,00	2 desa	38.456.500,00	33,33	30,28	2 desa	38.456.500,00	12,50	7,23	Realisasi anggaran pada triwulan I untuk identifikasi lokasi. 2 Desa Triwulan II Lokasi Pelatihan Pengemasan Produk.

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			Jumlah Desa Sosialisasi Program Jalin Matra.	0 Desa	0,00	82 Desa	75.000.000,00	84 Desa	75.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	-
	2.207.21.07.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	662.000.000,00	33 Kec.	170.000.000,00	33 Kec.	170.304.000,00	18 Kec.	72.139.500,00	54,55	42,36	18 Kec.	242.139.500,00	54,55	36,58	-
			Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	260.634.000,00	14 desa	45.128.000,00	0 desa	0,00	0 desa	0,00	0,00	0,00	0 desa	45.128.000,00	0,00	17,31	Sub Kegiatan ini sudah diakomodir pada Sub Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran.
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												55,56	28,84			20,00	30,06	
Predikat Kinerja Program												R	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												34,47	24,97			25,09	23,55	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
8	2.207.21.08	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	5.433.761.000,00	100%	975.712.000,00	100%	649.054.000,00	25%	118.305.000,00	25,00	18,23	25%	1.094.017.000,00	25,00	20,13	
	2.207.21.08.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	1.041.580.000,00	57 Desa	169.545.000,00	378 Desa	200.005.000,00	5 Desa	5.801.000,00	1,32	2,90	5 Desa	175.346.000,00	1,32	16,83	-
			Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	15 Desa	799.295.000,00	3 Desa	130.246.000,00	4 Desa	144.049.000,00	4 Desa	36.962.500,00	100,00	25,66	7 Desa	167.208.500,00	46,67	20,92	Triwulan I : Penilaian Administrasi di 2 Desa Triwulan II : Penilaian Lapang di 4 Desa Triwulan III : Monev di 2 desa.
			Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	412.000.000,00	390 Desa/Kel.	80.000.000,00	390 Desa/Kel.	45.000.000,00	15 Desa/Kel.	6.004.000,00	3,85	13,34	15 Desa/Kel	86.004.000,00	3,85	20,87	-

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0,00	0,00	0 kali	0,00	0,00	0,00	Sub Kegiatan ini sudah diakomodir pada Sub Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa.
			Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	378 Desa	1.515.141.000,00	59 Desa	325.921.000,00	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	59 Desa	325.921.000,00	15,61	21,51	Sub Kegiatan ini diajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
	2.207.21.08.0 2	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	1.240.000.000,00	378 Desa	200.000.000,00	378 Desa	200.000.000,00	26 Desa	69.537.500,00	6,88	34,77	26 Desa	269.537.500,00	6,88	21,74	
	2.207.21.08.0 3	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	425.745.000,00	378 Desa	70.000.000,00	378 Desa	60.000.000,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	70.000.000,00	0,00	16,44	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												25,00	18,23			25,00	20,13	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												22,41	15,33			14,86	23,66	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
9	2.207.21.09	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	100%	3.179.018.000,00	25%	602.018.000,00	43,75%	559.360.000,00	20%	240.221.500,00	45,71	42,95	20%	842.239.500,00	20,00	26,49	
	2.207.21.09.0 1	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	901.000.000,00	8 desa	175.000.000,00	16 desa	180.000.000,00	10 desa	69.167.000,00	62,50	38,43	10 desa	244.167.000,00	125,00	27,10	-
	2.207.21.09.0 2	Pengembangan Sumber Daya Desa	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	140 desa	278.000.000,00	0 desa	0,00	0 desa	0,00	0 desa	0,00	0,00	0,00	0 desa	0,00	0,00	0,00	-
			Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	938.018.000,00	4 desa	263.018.000,00	5 desa	165.000.000,00	5 desa	105.500.000,00	100,00	63,94	5 desa	368.518.000,00	125,00	39,29	Identifikasi Potensi Desa di 5 Desa pada triwulan I Pelatihan SDD Dari 5 desa/50 Orang pada triwulan II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	2.207.21.09.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	546.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	114.360.000,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	0 unit	100.000.000,00	0,00	18,32	Sesuai surat dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Pelaksanaan Gelar TTG dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 (Triwulan IV).
			Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	516.000.000,00	10 desa	64.000.000,00	12 desa	100.000.000,00	4 desa	65.554.500,00	33,33	65,55	4 desa	129.554.500,00	33,33	25,11	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												45,71	42,95			20,00	26,49	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												48,96	41,98			70,83	27,45	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			S	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												59,59	40,90			50,00	26,46	
Predikat Kinerja Program Total												R	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												43,52	33,17			43,11	24,05	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												SR	SR			SR	SR	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2018 setelah perubahan, terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan sebagai berikut:

a. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
8. Program Pengembangan Potensi Desa;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

b. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah ;
10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
14. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu ;
15. Pendidikan Dan Pelatihan Formal;
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd;
17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
18. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
19. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
20. Pembinaan Lembaga Adat;
21. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat;

22. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
23. Pengembangan Usaha Sektor Informal;
24. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran;
25. Pengembangan Sumber Daya Desa;
26. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
27. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
28. Penataan Pemerintahan Desa
29. Penatausahaan Keuangan Desa;
30. Penatausahaan Aset Desa.

Rincian program dan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan beserta pagu pendanaan, selengkapnya sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi		
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan						
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8			
2											
2	7										
2	7	1									
2	7	1	1	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	50 desa	211.722.500,00	7 kali	211.722.500,00	-	200 desa
					Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa	378 desa	255.550.000,00	-	-	(255.550.000,00)	378 desa
					Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	-	-	42 desa	411.729.000,00	411.729.000,00	
					Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 desa/kel	90.000.000,00	390 desa/kel.	100.000.000,00	10.000.000,00	390 desa/kel.
					Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 desa	175.000.000,00	3 desa	200.000.000,00	25.000.000,00	12 desa
2	7	1	2	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 desa	431.731.500,00	7 kali	272.502.475,00	(159.229.025,00)	378 desa
2	7	1	3	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 desa	79.745.000,00	378 desa	100.000.000,00	20.255.000,00	378 desa

2	7	2		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	50%	683.978.000,00	50%	623.500.000,00	(60.478.000,00)	
2	7	2	1	Pengembangan Lembaga Masyarakat	Jumlah Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	218.225.000,00	26 kali	175.000.000,00	(43.225.000,00)	26 desa
2	7	2	2	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah pembinaan lembaga adat desa	4 desa	73.500.000,00	2 kali	180.587.000,00	107.087.000,00	16 desa
2	7	2	3	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	392.253.000,00	33 Kec.	267.913.000,00	(124.340.000,00)	33 kec
2	7	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	32.503.000,00	100%	53.000.000,00	20.497.000,00	
2	7	3	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik /PDH (Stel)	50 stel	10.600.000,00	54 stel	53.000.000,00	42.400.000,00	DPMD
2	7	3	2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	53 stel	21.903.000,00	-	-	(21.903.000,00)	DPMD
2	7	4		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	880.135.200,00	100%	1.323.777.875,00	443.642.675,00	
2	7	4	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2250 buah	10.500.000,00	2250 buah	12.000.000,00	1.500.000,00	DPMD
2	7	4	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 orang	371.290.500,00	435 orang	546.741.000,00	175.450.500,00	DPMD
2	7	4	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	2	1.002.750,00	-	-	(1.002.750,00)	DPMD
2	7	4	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1935 jenis	48.159.825,00	2310 jenis	60.000.000,00	11.840.175,00	DPMD
2	7	4	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32690 kenis	17.955.000,00	1525 jenis	20.148.000,00	2.193.000,00	DPMD
2	7	4	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	45 jenis	2.548.875,00	48 jenis	2.548.875,00	-	DPMD

2	7	4	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	5.670.000,00	1584 jenis	5.670.000,00	-	DPMD
2	7	4	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12090 HOK	139.403.250,00	14940 HOK	199.275.000,00	59.871.750,00	DPMD
2	7	4	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	150 HOK	118.203.750,00	433 HOK	253.075.000,00	134.871.250,00	DPMD
2	7	4	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	425 HOK	165.401.250,00	566 HOK	224.320.000,00	58.918.750,00	DPMD
2	7	5		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	619.591.650,00	100%	579.645.000,00	(39.946.650,00)	
2	7	5	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 / Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	4 unit	513.126.000,00	4 unit	452.696.000,00	(60.430.000,00)	DPMD
2	7	5	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	15 jenis	44.890.650,00	10 jenis	61.894.000,00	17.003.350,00	DPMD
2	7	5	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	27 Unit	39.000.000,00	17 Unit	42.480.000,00	3.480.000,00	DPMD
2	7	5	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	62 jenis	22.575.000,00	28 jenis	22.575.000,00	-	DPMD
2	7	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	119.759.850,00	100%	119.759.850,00	-	
2	7	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Buku	105.855.750,00	14 Buku	105.855.750,00	-	DPMD

2	7	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	6.223.350,00	1 Buku	6.223.350,00	-	DPMD
2	7	6	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	7.680.750,00	1 Buku	7.680.750,00	-	DPMD
2	7	7		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10.920.000,00	100%	5.000.000,00	(5.920.000,00)	
2	7	7	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	16 orang	10.920.000,00	25 orang	5.000.000,00	(5.920.000,00)	DPMD
2	7	8		Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	34%	787.500.000,00	43,75%	660.000.000,00	(127.500.000,00)	
2	7	8	1	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	9 desa	241.481.000,00	12 desa	180.000.000,00	(61.481.000,00)	50 Desa
2	7	8	2	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	5 kali	276.169.000,00	1 kali	165.000.000,00	(111.169.000,00)	24 Desa
					Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/ Jumlah Desa Maju	0	-	127 desa	100.000.000,00	100.000.000,00	378 desa
2	7	8	3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	204.680.000,00	2 unit	100.000.000,00	(104.680.000,00)	8 desa
					Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	65.170.000,00	12 desa	115.000.000,00	49.830.000,00	48 desa
2	7	9		Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	36%	787.500.000,00	36%	505.000.000,00	(282.500.000,00)	
2	7	9	1	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	12 desa	367.500.000,00	12 desa	200.000.000,00	(167.500.000,00)	60 desa
2	7	9	2	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	5 desa	170.000.000,00	6 kali	130.000.000,00	(40.000.000,00)	25 Desa

2	7	9	3	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	1 kali	75.000.000,00	-	-	(75.000.000,00)	20 desa
					Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat	1 kali	175.000.000,00	10 kali	175.000.000,00	-	145 Desa
Jumlah							5.165.636.700,00		5.165.636.700,00	-	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, terdapat sebanyak 9 (sembilan) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka akan dilaksanakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana, akan diusulkan pada kegiatan tahun berikutnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI